UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Irvan Rizqian

Polri (Polres Bandung-Soreang)

E-mail: irvanrizqian@gmail.com

Masuk: Oktober 2020	Penerimaan: November 2020	Publikasi: Januari 2021
---------------------	---------------------------	-------------------------

ABSTRAK

Aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian adalah sebagai berikut upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaji menurut hukum pidana Indonesia adalah Peran Orang Tua, memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual, keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua. Peran Masyarakat, penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Peran Negara, rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Kata Kunci : Kekerasan; Korban; Rehabilitasi; Seksual.

ABSTRACT

Law enforcement officials provide appropriate sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence, so that the rule of law is really upheld and order is created in society. Sanctions are expected to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of sexual violence so that they will not repeat their actions and prevent other people from committing these crimes due to the threat of severe sanctions. The juridical approach is an approach that uses the rules and regulations related to the problem under study, using primary data supported by secondary data. The results of the study are as follows: the efforts to overcome criminal acts of sexual violence against children

studied according to Indonesian criminal law are the role of parents, play an important role in protecting children from the threat of sexual violence, the involvement of parents in the process of handling sexual violence experienced by their children, both handling legal and psychological recovery treatment for psychological services for children and for parents. The role of society, in handling sexual violence against children, requires the participation of the community, by paying attention to aspects of prevention that involve citizens and also involves children, which aims to provide protection to children at the grassroots level. The role of the State, medical rehabilitation is a process of integrated treatment activities by restoring the physical condition of the child, victim's child and/or witness's child. Social rehabilitation is a process of integrated recovery activities, physically, mentally and socially, so that child victims and/or children of witnesses can return to carry out social functions in life in the community.

Keywords : Campaign; ; Criminal; Enforcement; General election.

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima bahan atau konsep yang terkandung atau yang termuat dalam perundang-undangan. Menegakkan hukum dan memberantas kejahatan tidaklah cukup berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus ditinjau dari aspek budaya, moral, agama, bahkan para sarjana hukum berpendapat bahwa pidana adalah obat terakhir atau pembedaan terakhir.

Konsep Negara hukum di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai moral dan kebudayaan menjadi titik dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Terjadinya kejahatan akhir-akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak, maupun media elektronik, yang tampaknya semakin hari semakin mewarnai berita utama media-media tersebut (Dwidja Priyatno, 2005).

Kecenderungan meningkatnya kejahatan baik dari kualitas maupun dari segi kuantitas merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya, mempergunakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan, serta kejahatan merupakan perbuatan yang sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan masyarakat, kecemasan yang timbul bukan hanya dari kalangan masyarakat, akan tetapi juga timbul dikalangan korban kejahatan itu sendiri. Penggolongan

kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, melainkan juga kejahatan seks yang juga sangat bertentangan dengan Norma-Norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal (Ismantoro Dwi Yuwono, 2006).

Anak adalah bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. (Zai et al., 2011)

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa *pubertas*. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua, meskipun telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode *pra* sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering

merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak” (Tinny Sumartiny, 2010).

Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, merupakan perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak dapat menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menomorlakan keinginan pelaku. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, Norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.

Pertimbangan Hakim juga menentukan berat ataupun ringannya pembedaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah

terlalu ringannya pidana, jadi adanya keyakinan Hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu putusan penting untuk diselidiki. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum.

Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1) Demi alasan ketertiban umum, 2) Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat. 3) Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas (Sumarsono, 2008).

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia, sebagai salah satu upaya pencegahan adanya tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat

secara langsung diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini (Soerjono Soekanto, 2006).

C. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial.

1. Peran Orang Tua.

Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali, terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.

2. Peran Masyarakat.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan

juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.

3. Peran Negara.

Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak, oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya.

4. Pendekatan Berbasis Sistem.

Memilik penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, maka pendekatan perlindungan terhadap anak yang perlu dilakukan haruslah berbasis sistem. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang menekankan tanggung jawab atau kewajiban dari negara sebagai *primary duty bearer* dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Negara mengakui anak sebagai pemegang hak dan berhak atas perlindungan dan merupakan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan anak.

5. Kajian Hukum dan Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tindak Pidana dan Sanksi Atas Kekerasan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yaitu tentang Perlindungan Anak

memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pencabutan hak asuh bagi orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan anak dalam keluarga, yaitu: 1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan 2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. 4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak asuh anak terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam keluarga, maka hakim juga harus menentukan batas waktu atau lamanya pencabutan hak asuh anak tersebut, dengan kata lain orang tua mempunyai hak untuk memperoleh kembali hak asuh anak melalui penetapan pengadilan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Dampak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. a. Dampak Psikologis. Korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. b. Dampak Fisik. Kekerasan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual (PMS). c. Dampak Sosial. Korban kekerasan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Adalah a. Peran Orang Tua, Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. b. Peran Masyarakat adalah penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. c. Peran Negara

adalah Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi.

Secara represif perlindungan hukum berupa: a) Pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut; b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula; c) Pelayanan atau bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik; d. Pendekatan Berbasis Sistem. Komponen-komponen didalam perlindungan terhadap anak yang berbasis sistem UNICEF, meliputi: 1) Sistem Kesejahteraan Sosial bagi anak-anak dan keluarga. Sistem ini bertujuan mencegah terjadi dan terulangnya perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak melalui peningkatan kapasitas keluarga yang bertanggung jawab agar tercapainya kesejahteraan dan perlindungan anak. 2) Sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional. Sistem peradilan disini terkait dengan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan dan sesuai dengan standard internasional. 3) Mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

2. Saran

Seharusnya orang tua, masyarakat, dan aparat keamanan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual secara intensif karena semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual.

Harus adanya Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi

sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidja Priyatno. (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. STHB Press.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2006). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual*. PT. Karya.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Metode Analisis Data*. Surya Citra.
- Sumarsono. (2008). *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Balai Pustaka.
- Tinny Sumartiny. (2010). *Priode Perkembangan Anak*. Rosda Karya.
- Zai, A., Siregar, T., & Irsan, D. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 86–103.